

Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle

Muhammad Rizal Fathurahman¹, Made Panji Teguh Santoso²

¹²University Of Singaperbangsa Karawang

Email: rizalfo20203@gmail.com

Abstract: *The Golden Triangle region, located at the convergence of the borders of Thailand, Laos, and Myanmar, is globally recognized as one of the largest producers of opium and synthetic drugs. This area has long been a focal point of transnational narcotics trafficking, significantly affecting not only the producing countries but also neighboring states in Southeast Asia. The spillover of illegal drugs from this region has become a pressing concern for ASEAN member states due to its impact on public health, security, and regional stability. This article examines ASEAN's role in addressing the drug problem in the Golden Triangle through mechanisms of regional cooperation, law enforcement strategies, and preventive programs. ASEAN has developed a coordinated approach that includes policy harmonization, cross-border collaboration, and capacity building among its members. Despite these collective efforts, the study finds that major challenges remain, such as limited resources, porous borders, and weak governance in some areas. The findings suggest that while ASEAN's initiatives have laid a foundation for regional action, stronger political commitment, enhanced intelligence sharing, and increased support for grassroots-level interventions are needed to realize the goal of a drug-free ASEAN. This study underscores the need for a more integrated and sustained response to the persistent drug trade in the Golden Triangle.*

Keywords: *Golden Triangle, ASEAN, Drug Trafficking, Transnational Crime.*

Abstrak: Kawasan Segitiga Emas, yang terletak di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar, dikenal secara global sebagai salah satu produsen terbesar opium dan narkoba sintetis. Wilayah ini telah lama menjadi pusat peredaran narkoba lintas negara yang berdampak signifikan tidak hanya pada negara-negara penghasil, tetapi juga pada negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Penyebaran narkoba ilegal dari kawasan ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara anggota ASEAN karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas kawasan. Artikel ini mengkaji peran ASEAN dalam menanggulangi permasalahan narkoba di kawasan Segitiga Emas melalui mekanisme kerja sama regional, strategi penegakan hukum, dan program pencegahan. ASEAN telah membangun pendekatan yang terkoordinasi, termasuk harmonisasi kebijakan, kolaborasi lintas batas, dan peningkatan kapasitas antar negara anggota. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan perbatasan, dan tata kelola yang belum optimal di beberapa wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa inisiatif ASEAN telah menjadi dasar bagi aksi regional, namun dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat, peningkatan berbagi informasi intelijen, dan dukungan terhadap intervensi di tingkat akar rumput untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba.

Kata kunci: Segitiga Emas, ASEAN, Peredaran Narkoba, Kejahatan Transnasional.

PENDAHULUAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebagai organisasi regional, ASEAN memainkan peran penting dalam menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di negara-negara anggotanya. Kawasan Asia Tenggara, khususnya daerah yang dikenal sebagai Golden Triangle yang mencakup perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar, merupakan salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia. Peredaran narkoba dari Kawasan ini berdampak luas tidak hanya di negara penghasil, tetapi juga menyebar ke seluruh negara anggota ASEAN yang menimbulkan masalah Kesehatan, social, dan keamanan yang serius.

Peredaran obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara terkonsentrasi di Segitiga Emas atau yang lebih dikenal Golden Triangle. Kawasan ini dinamakan Segitiga Emas karena merupakan Kawasan berbentuk segitiga yang terbentuk oleh perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand. Daerah ini merupakan daerah pegunungan seluas 950km persegi yang lahannya digunakan untuk penanaman opium.

Segitiga Emas merupakan kawasan yang menghasilkan opium terbesar kedua setelah Afghanistan atau yang disebut Golden Crescent. Produksi obat-obatan terlarang di Segitiga Emas termasuk kedalam kategori narkotika dan dapat menimbulkan rasa kecanduan. Narkotika dibuat dari tanaman opium atau disebut juga poppy yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan jenis narkotika heroin.

Golden Triangle adalah salah satu wilayah penghasil narkoba terbesar di dunia, menghasilkan sejumlah besar opium, heroin, dan narkoba sintetis seperti metamfetamin. Situasi ini memberikan tantangan besar bagi negara-negara di ASEAN, mengingat penyebaran narkoba berdampak pada kesehatan, keamanan, dan stabilitas sosial. Artikel ini bertujuan

untuk menganalisis peran dan efektivitas ASEAN dalam mengatasi masalah narkoba di kawasan Golden Triangle.

ASEAN telah membentuk berbagai mekanisme kerjasama untuk menanggulangi narkoba, termasuk ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). Kedua forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan narkoba di antara negara anggota.

Berdasarkan penjelasan dari pendahuluan diatas, maka dari itu peneliti menyimpulkan rumusan masalah untuk membuat suatu gagasan mengenai : Bagaimana upaya ASEAN dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kawasan Gloden Triangle, dan seberapa efektif upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kejahatan transnasional yang menyimpang dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan Bassiouni. Dimana menurut Bassiouni , kejahatan transnasional harus mengandung sebuah unsur inti, baru dapat dikatan sebuah kejahatan bersifat transnasional, yaitu :

1. Faktor internasional ini meliputi ancaman langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, dan memberikan dampak langsung kepada individu perorangan.
2. Faktor transnasional meliputi factor-faktor sebagai berikut, tindakan yang mempengaruhi lebih dari satu Negara, Tindakan yang melibatkan atau mempengaruhi warga lebih dari satu Negara, dan infrastruktur dan metode yang digunakan di luar wilayah satu Negara.

3. Pada saat yang sama, faktor-faktor yang diperlukan dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang diperlukan untuk Kerjasama pencegahan antar Dari pemahaman Bassiouni, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah suatu negara borderless. Modus operasional bentuk atau jenis, dan tempat, tempic delicti melibatkan sistem hukum di banyak negara dan berbagai wilayah. Akibat krisis ekonomi yang parah di Asia Tenggara sejak tahun 1998, kejahatan terorganisir meningkat pesat dengan kemerosotan ekonomi ASEAN, inilah salah satu penyebab maraknya kejahatan di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Segitiga Emas.

Kerjasama internasional adalah konsep yang menjadi pondasi dalam hubungan antarnegara di era globalisasi saat ini. Hal ini dapat mencakup beragam bentuk kerjasama antarnegara, seperti perdagangan, diplomatik, keamanan, lingkungan, dan banyak lagi. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan internasional. Kerjasama internasional dapat dijelaskan sebagai satu bentuk hubungan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan tindakan berbagi sumber daya, informasi, teknologi, keahlian, dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama atau mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks globalisasi saat ini, kerjasama internasional dapat menjadi kunci dalam menjawab tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, kemiskinan, perdagangan ilegal, dan lainnya. Oleh karena itu, kerjasama internasional memiliki peran yang vital dalam mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan di seluruh dunia. Kerjasama internasional memberikan banyak manfaat bagi

negara-negara yang terlibat. Salah satu manfaat utama dari kerjasama internasional adalah meningkatkan akses terhadap sumber daya dan teknologi. Dengan berbagi sumber daya dan teknologi, negara-negara dapat mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas. Dengan bekerja sama dalam masalah keamanan global seperti terorisme dan perdagangan senjata ilegal, negara-negara dapat memperkuat pertahanan mereka dan menjaga kedamaian di wilayah mereka. Selain itu, kerjasama internasional juga bisa menjadi solusi untuk tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat menciptakan kebijakan global yang efektif untuk mengatasi isu-isu ini dengan lebih baik.

Kerja sama bilateral melibatkan dua negara yang sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mencapai keuntungan bersama dan meningkatkan hubungan antara kedua negara tersebut. Dalam konteks politik, kerja sama bilateral dapat mencakup pertukaran informasi, dukungan politik, serta kerjasama dalam menangani isu-isu global seperti perdamaian dan keamanan.

Liberal Institusionalisme merupakan sebuah paradigma yang berasal dari teori besar neoliberalisme, paradigma tersebut berbicara perlunya pembentukan lembaga-lembaga internasional. Lalu apa itu lembaga internasional? Berdasarkan institutional liberals, merupakan sebuah organisasi yang

sifatnya mencakup banyak negara, seperti NATO, European Union, atau ASEAN, adapun pengertian lainnya yaitu serangkum peraturan yang dimana dibuat aktor negara di berbagai negara. Serangkum aturan tersebut lah yang disebut “regimes” atau rezim. Rezim yang dibutuh dalam sistem internasional yang anarkis, sesuai dengan pandangan neoliberalis terhadap kerjasama, maka dari itu rezim internasional harus didukung. Rezim internasional diperlukan oleh negara untuk kebaikan bersama, sehingga pendekatan neoliberal juga Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional <https://jurnafis.untan.ac.id> Page 291 disebut teori berbasis bunga-rezim dimana kepentingan umum adalah hal-hal yang menyebabkan rezim untuk berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan penelitian ini peneliti menggunakan metode eksplanatif dengan penelitian kualitatif, dimana menurut pedekatan kualitatif yang di kemukakan oleh Sugiyono adalah sebuah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistic atau melalui kuantitas. Pendekatan kualitatif lebih meyoroti studi kualitas atau hal yang paling penting dalam bentuk peristiwa, kejadian, dan fenomena sosial adalah makna di balik peristiwa ini bias menjadi sebuah pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teoritis. Kualitatif objek penelitian mungkin harus berkontribusi pada teori, praktek, politik, sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus ini secara intensif dipelajari oleh kelompok individu atau yang mengalami kasus tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerjasama Regional

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) merupakan sebuah badan komite yang dibentuk ASEAN untuk menangani masalah drugs trafficking,

dalam melakukan tugasnya ASOD sendiri berada dalam wewenang ASEAN. Wewenang dan tugas ASOD sendiri telah dirumuskan di dalam Piagam ASEAN pasal tujuh. Peran ASOD dalam menanggulangi permasalahan drugs trafficking sangat diperlukan. Upaya ASOD dalam penanggulangan drugs trafficking dilakukan dengan empat langkah penting.

Langkah pertama ASOD adalah membentuk traning centre yang didirikan di negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement di Bangkok, Thailand; ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education di Manila, Filipina; ASEAN Training Centre for Treatment and Rehabilitation di Kuala Lumpur, Malaysia; dan ASEAN Training Centre for the Detection of Drugs in Body di Singapura merupakan training centre dari program ASOD dalam menanggulangi drugs trafficking. Kemudian langkah kedua ASOD yaitu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti ASEANAPOL, UNODC, dan Cina. Kerjasama yang dilakukan oleh ASOD dan pihak terkait ini hanya sebatas mengundang dan diundang dalam pertemuan rutin masing-masing pihak.

Selanjutnya langkah ketiga ASOD yaitu menyarankan tiga program dasar bagi negara-negara Asia Tenggara dalam menangani drugs trafficking. Tiga program dasar ASOD tersebut ialah Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development. Langkah terakhir ASOD yaitu melakukan pertemuan rutin. Pada pertemuan rutin tersebut ASOD melakukan diskusi antar negara anggota untuk membentuk strategi untuk menanggulangi drugs trafficking.

ASOD memberikan saran bagi Myanmar untuk menjalankan tiga program dasar ASOD, yaitu Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development. Upaya Demand Reduction dengan melakukan

penghapusan ladang opium di Myanmar. Pemberantasan ladang opium dilakukan dengan cara, penebangan, penutupan lahan, dan lain-lain. Upaya pemerintah ini dibuktikan dengan adanya program 15 Year Narcotics Elimination Plan 1999-2014, program ini adalah program yang dibentuk untuk menanggulangi opium di Myanmar. Program ini terdiri dari tiga bagian yaitu First five years plan 1999-2004, Second five years plan 2005-2009, dan Third five years plan 2010- 2014. Program Law Enforcement sendiri erat kaitannya dengan hukum yang berada di tiap-tiap negara di Golden Triangle sendiri, Myanmar sendiri telah mempunyai undang-undang tentang narkotika khususnya jenis opium, seperti Opium Dens Suppression Act tahun 1950 dan The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law section 16 tahun 1993. Pemerintah Myanmar juga meningkatkan pertahanan dan keamanan dengan memperketat perbatasan dan peredaran narkotika dengan menambah pasukan di daerah rawan seperti Shan, Kachin, dan juga perbatasan. Pemerintah Myanmar juga mengeluarkan dana yang ditujukan untuk program pelatihan pasukan untuk upaya penangkapan dan penyitaan. Program Alternative Development yang di bentuk ini bertujuan untuk menanggapi dampak yang ada setelah melakukan pemusnahan ladang opium di Myanmar. Pemerintah Myanmar memberikan dana bantuan yang diberikan kepada para mantan petani opium agar mendapatkan standar hidup lebih baik. Myanmar juga melakukan Pendekatan dan pelatihan bagi para petani, seperti mengadakan Basic Agricultural Training, Farmer Field School, Identification of Sustainable Alternative Crop Varieties and Crop Substitution.

Upaya pemerintah Laos dalam melakukan Demand Reduction ini dilakukan dengan cara mengurangi lahan opium yang ada di Laos sendiri. Dengan menggunakan strategi tersebut, pemerintah Laos kemudian mengeluarkan program, yaitu National Drug Control Programme dan The Balanced Approach to Opium Elimination . Program Demand

Reduction yang dicanangkan oleh pemerintah Laos bertujuan untuk mengurangi penggunaan narkotika khususnya jenis opium dan mengurangi penyebaran HIV karena jarum suntik. National Programme Strategy for the Post-Opium Scenario and The Action Plan merupakan program pemerintah Laos yang mencakup Alternative Development. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Laos sendiri total berjumlah US\$ 72 juta. Dana tersebut kemudian dianggarkan ke delapan program, Trend Analysis and Risk Assessment, Alternative Development and Poverty Reduction, Drug Demand Reduction and HIV & AIDS Prevention, Civic Awareness and Community Mobilization, Law Enforcement, Chemical Precursor Control and Forensics Capacity, International and National Cooperation, dan Institutional Capacity Building. Pada program Law Enforcement, Pemerintah Laos melalui program Alternative Development programnya telah memberikan dana bantuan sebesar US\$ 8 juta. Dalam pelaksanaannya Laos meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan melakukan upaya penyitaan merupakan salah satu upaya perwujudan program Law Enforcement.

Thailand juga mengadopsi saran ASOD dalam menanggulangi permasalahan opium. Salah satu upaya Demand Reduction Thailand dalam menangani drugs trafficking yaitu memusnahkan lahan opium. Pemusnahan opium sendiri berawal saat perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra menyatakan statmentnya “War on Drugs” pada tahun 2005. Program War on Drugs merupakan sebuah program Demand Reduction yaitu program pemusnahan lahan opium di Thailand, dan program ini terus berjalan hingga tahun berikutnya. Thailand mengeluarkan Alternative Development yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan

ketrampilan masyarakat di Thailand, dan memberikan mata pencaharian alternatif bagi para petani opium. Upaya program Alternative Development Thailand lainnya adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kemungkinan baru bagi para pecandu opium untuk dapat menjadi produktif kembali. Thailand dalam menanggulangi permasalahan opium ini juga melakukan upaya Law Enforcement. Salah satu upaya Law Enforcement yang dilakukan Thailand, membentuk ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement di Bangkok. Thailand juga dalam melaksanakan program ini merealisasikannya dengan melakukan penangkapan dan penyitaan di daerah perbatasan. Sebuah institusi berperan untuk memfasilitasi sebuah kerjasama. Salah satu peran dalam memfasilitasi kerjasama yaitu menyediakan sebuah forum. Pada forum tersebut, para negara anggota juga dapat membentuk struktur-struktur untuk penegakan dan penyelesaian masalah. Meskipun pada akhirnya pelaksanaan hal tersebut tergantung kepada keputusan masing-masing negara. Institusi juga mempunyai peran menyediakan informasi tentang aksi dan hasil dari upaya yang dilakukan negara-negara anggota dalam institusi. Melihat peran ASOD sebagai institusi dalam menanggulangi drugs trafficking sudah sesuai dengan teori peran institusi. Namun dalam upaya dalam menanggulangi drugs trafficking sendiri belum maksimal, hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu seperti meskipun sudah melakukan upaya pemusnahan lahan opium di Golden Triangle tetap meningkat faktor pendukung terjadinya hal tersebut adalah tidak sebandingnya ladang yang dimusnahkan dan ladang baru yang muncul. Negara Golden Triangle melakukan upaya penyitaan opium pada setiap tahunnya dan negara Thailand bahkan telah melakukan penyitaan dan penangkapan. Namun motif-motif baru penyelundupan, kurangnya pelatihan dari

petugas perbatasan, adanya kerjasama antara petugas perbatasan dan pelaku, merupakan faktor-faktor penghambat berjalannya program Law Enforcement ini dengan baik. Banyaknya oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri, masalah kemiskinan dan ekonomi merupakan contoh-contoh hambatan yang harus dihadapi.

ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) pertama kali diadakan pada tahun 2012. Pertemuan ini dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya tantangan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan AMMD menunjukkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk secara kolektif menangani isu narkoba melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih erat di tingkat regional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan AMMD, yaitu :

1. Meningkatnya Ancaman Narkoba di ASEAN
Negara-negara ASEAN menghadapi peningkatan produksi, penyelundupan, dan konsumsi narkoba, termasuk narkoba sintetis yang sulit dideteksi. Peredaran narkoba melintas batas-batas negara, memerlukan Kerjasama internasional untuk penanggulangannya.
2. Kebutuhan akan Koordinasi Regional
Penyalahgunaan narkoba adalah masalah lintas negara yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat di tingkat regional. ASEAN juga memiliki sejarah Panjang Kerjasama di berbagai bidang, dan isu narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Komitmen Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
ASEAN telah menunjukan komitmen kuat terhadap

pengangguulan narkoba melalui berbagai deklarasi dan kebijakan sejak awal pembentukannya. Pada tahun 2000, ASEAN menetapkan visi bebas narkoba dan menunjukan tekad politik untuk menangani masalah ini secara serius.

4. Peran Strategis Asean dalam Kerjasama Internasional
ASEAN berfungsi sebagai platform strategis untuk berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik di antara negara-negara anggotanya serta dengan komunitas internasional. AMMD menjadi forum utama untuk merumuskan kebijakan dan strategi regional dalam memerangi masalah narkoba.

Border Liaison Office (BLO) adalah kantor koordinasi untuk lembaga penegak hukum nasional yang memfasilitasi dan mempromosikan kerja sama lintas batas yang lebih besar. Mulai tahun 1993, enam negara di Sub-wilayah Mekong Besar (Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam) sepakat untuk berkerja sama dalam upaya kontra-narkotika di bawah Nota Kesepakatan termasuk melalui kerja sama pengawasan perbatasan. Petugas BLO berpatroli diperbatasan dan berfungsi sebagai focal point untuk menyampaikan informasi intelejen penting kepada rekan mereka. BLO mempromosikan komunikasi dan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum nasional yang bekerja di sepanjang perbatasan. Terhitung dari pertama kalinya BLO diresmikan yaitu pada tahun 1999 ada 41 BLO yang sudah didirikan sampai dengan tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 dibangun lagi 11 BLO baru, dan 18 BLO dibangun atas kesepakatan bilateral antara pemerintah Thailand, Kamboja, dan Laos. Total ada 70 BLO yang dibangun sepanjang Sungai Mekong.

Kawasan Sungai Mekong telah menjadi jalur perdagangan narkoba lebih dari 70 tahun dan berkembang

pesat pada kawasan Golden Triangle. Golden Triangle merupakan daerah delta pertemuan Sungai Mekong dengan luas sekitar 150.000 km yang melintasi wilayah Thailand, Laos, dan Myanmar. Sungai Mekong merupakan rute transportasi regional yang cukup besar. Oleh karena itu, ketidakstabilan Golden Triangle membuat prospek perkembangan wilayah itu sulit untuk diwujudkan. Operasi gabungan GMS yang terdiri dari Tiongkok, Laos, Myanmar, dan Thailand telah berulang kali dilakukan. Telah dilaksanakan penangkapan sebanyak 2.534 kali selama kampanye ASEAN Drug-Free Area di sepanjang Sungai Mekong selama periode 2016-2019. Operasi yang bernama Safe Mekong River itu berhasil menyita 9,78 ton obat terlarang, 38 senjata api, uang senilai 3,6 juta US\$, dan 260 ton bahan kimia precursor.

2. Analisis Kejahatan Transnasional dengan Situasi drug trends di Golden Triangle.

Golden Triangle pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi US\$ 13.500 yang dilaporkan di Golden Triangle dibandingkan dengan kawasan lain dapat menyebabkan kelompok TOC, termasuk kelompok TOC Taiwan, untuk meningkatkan sumber narkotika dari Golden Triangle. Operasi penegakan hukum di Golden Triangle memberikan bukti bukti bahwa metemfetamin dalam jumlah besar, serta narkotika sintetis lainnya, diproduksi di kawasan tersebut. Antara 2018 dan 2019, otoritas Myanmar membongkar enam fasilitas pembuatan narkotika berskala besar di Kutkai, Negara Bagian Shan Utara. Dengan lonjakan produksi metemfetamin di Golden Triangle, penyitaan metemfetamin tahunan telah meningkat secara signifikan di negara-negara di wilayah Mekong, khususnya Laos,

Myanmar dan Thailand.

Meningkatnya aliran gelap tablet metamfetamin ke arah barat dari Golden Triangle terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Menurut otoritas Myanmar, sekitar sepertiga dari semua tablet metamfetamin yang disita pada tahun 2018 ditemukan di negara bagian Rakhine, menunjukkan aliran besar dari Myanmar. Penyitaan tablet metamfetamin di Myanmar pada tahun 2017 berjumlah lebih dari 40 juta tablet, meningkat 42% di bandingkan angka yang dilaporkan pada tahun 2013. Antara 2018 dan 2019, total ada 14 lab obat kladestin disita di Myanmar, yang merupakan perkembangan signifikan dibandingkan tahun 2017 ketika tidak ada lokasi manufaktur yang dibongkar.

3. Resolusi ASEAN dalam Menangani Kasus Nakoba di Kawasan Golden Triangle

Dalam upaya mencapai kawasan bebas narkoba, negara-negara anggota ASEAN telah memfokuskan tujuan kebijakannya hanya pada pemberantasan pasar narkoba, yaitu penggunaan dan penyediaan narkoba. Keberhasilan diukur dari jumlah orang ditangkap atau yang berhasil diringkus, volume atau jumlah narkoba yang berhasil disita, dan pemberantasan tanaman narkoba yang berhasil di basmi, dan yang terakhir jumlah orang yang memasuki rehabilitasi untuk penggunaan narkoba. Kebijakan alternatif yang berupaya untuk mengatur perdagangan narkoba dan mengejar strategi pengurangan dampak buruk akan membantu keuntungan kelompok kriminal. Kebijakan yang mengarahkan kembali pilihan konsumen untuk melemahkan barang dan jasa yang disediakan oleh kejahatan terorganisir juga akan membantu. Kunci efektif untuk menekan kejahatan transnasional adalah dengan mengikutsertakan kelompok ASEAN +3 yaitu kerjasama ASEAN dengan negara adidaya di Asia Timur yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

ASEAN sendiri sudah membentuk

badan khusus untuk mengatasi masalah sirkulasi peredaran dan produksi narkoba di wilayah Asia Tenggara. ASOD berperan sebagai badan yang menjalankan ASEAN Declarations of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, ASOD sendiri telah merancang tiga program dasar untuk diimplikasikan secara khusus di kawasan Golden Triangle, yaitu Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development.

A. Laos

Pemerintah Laos mengeluarkan sebuah program yaitu The Balanced Approach to Opium Elimination dan National Drugs Control Programme. Program mendasar dari ASOD yang dijalankan oleh pemerintah Laos bertujuan untuk mengurangi penggunaan narkoba khususnya jenis opium dan mengurangi penyebaran HIV karena jarum suntik. Sedangkan dalam menjalankan program Alternative Development, pemerintah Laos mengadakan program strategi nasional untuk pasca-opium dan plan of action. Dana bantuan yang disiapkan oleh pemerintah Laos berjumlah 72 juta US\$. Dana tersebut kemudian dianggarkan menjadi delapan program lainnya Trend Analysis and Risk Assesment, Alternative Development and Poverty Reduction, Drug Demand Reduction and HIV & AIDS Prevention, Civic Awareness and Community Mobilization, Law Enforcement, Chemical Precursor Control and Forencics Capacity, International and National Cooperations, dan Institutional Capacity Building. Dalam program Law Enforcement dalam program pengembangan alternatif telah menyisihkan dana 8 juta US\$ untuk menerapkan peningkatan kinerja pengawasan di daerah yang rentan dan penyitaan narkoba.

B. Myanmar

ASOD sendiri memberikan saran kepada Myanmar untuk menjalankan tiga program dasar tersebut. Upaya

pengurangan permintaan dengan menghilangkan ladang opium yang dilakukan dengan penebangan dan penutupan lahan. Upaya pemerintah Myanmar dibuktikan dengan adanya program rencana eliminasi narkoba dari tahun 1999-2014, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu rencana lima tahun 1999-2004, kemudian lima tahun kedua 2005-2009, dan tahun ketiga 2010-2014. Program ini dibentuk untuk mengatasi produksi opium di Myanmar. Program Law Enforcement itu sendiri terkait dengan hukum di masing-masing kawasan di Golden Triangle itu sendiri. Pemerintah Myanmar memperketat pengamanan di perbatasan dengan menambah pasukan di Shan dan Kachin. Pemerintah Myanmar juga menghabiskan dana yang ditujukan untuk program pelatihan pasukan dalam upaya menangkap dan melakukan penyitaan. Pada program Alternative Developments dibentuk dengan tujuan menanggapi dampak yang ada setelah memadamkan bidang opium di Myanmar.

C. Thailand

Thailand juga menerapkan program dasar dari ASOD. Salah satunya pengupayaan dalam mengurangi permintaan Thailand dalam menangani sirkulasi narkoba adalah untuk memberantas lahan opium. Pemberantasan ini dimulai ketika Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyatakan perang terhadap narkoba pada tahun 2005. Program "war on drugs" adalah program yang dijalankan untuk pemusnahan lahan opium di Thailand. Dalam upaya menjalankan program Alternative Developments Thailand menyediakan mata pencaharian alternatif bagi petani opium, meningkatkan kesehatan, mengurangi kemiskinan dan peningkatan keterampilan. Program dasar ASOD ketiga yaitu Law Enforcement dilakukan pemerintah Thailand dengan membentuk ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement di Bangkok. Dalam mengimplementasikan program ini, Thailand melaksanakannya dengan penangkapan dan penyitaan di daerah utara Chiang Mai.

KESIMPULAN

Upaya ASEAN melalui ASOD dan AMMD serta kerjasama lintas batas seperti BLO telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Terdapat beberapa tantangan bagi ASEAN dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kawasan Golden Triangle yaitu peralihan jenis narkoba yang diproduksi di Golden Triangle dimana yang awalnya opium, seiring perkembangan zaman berganti menjadi metamphetamine, walaupun opium itu sendiri masih diproduksi hingga sekarang. Peran ASEAN melalui ASOD telah memberikan kontribusi signifikan dalam menangani kasus narkoba di kawasan Golden Triangle, dengan berbagai program dan kerjasama yang diinisiasi. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh munculnya ladang baru, korupsi, kolusi, kemiskinan, dan perubahan metode produksi dan penyelundupan narkoba. Perlu adanya peningkatan koordinasi, pengawasan, dan dukungan dari negara-negara anggota serta komunitas internasional untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- geograf.id. (2024, January 14). *Pengertian Kerjasama Internasional*. Retrieved from Geograf.id: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kerjasama-internasional/>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- ASEAN, ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crime. <http://www.asean.org/communities/asean-politicalsecuritycommunity/item/asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime>. Diakses pada tanggal 11 November 2014
- ASEAN, (2012). Report of The 9th Meeting of the ASEAN Inter-

- Parliamentary Assembly
(AIPA) Country Progress Report Of Myanmar Activities on the fight against narcotic drugs in Myanmar 12 July 2012.
- ASEAN, (2008). Report of The AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) Thailand Country Report 2008
- ASEAN, (2013). Report of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA Activities on the Fight against Narcotic Drugs in Myanmar Policy and Strategies on Narcotic Drugs 2013
- ASOD, A. S. (2016, Oktober 20). ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025. Retrieved 07 20, 2020, from <https://asean.org/storage>
- Kramer, T., Jelsma, M., & Blickman, T. (2016). Withdrawal Symptoms in The Golden Triangle : A Drugs Market in Dissarray. Amsterdam: Transnational Institute.
- Broadhurst, R. (2016, Desember 10). Asia Is in the Grip of a Transnational Crime Crisis : Yet governments are looking the other way. Retrieved November 25, 2020, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/12/as-ia-is-in-the-grip-of-a-transnational-crime-crisis/>
- Broadhurst, R. (2014). The Golden Triangle : Inside Southeast Asia's drug trade. ANZ Journal of Criminology, Australian National University, 1-4.
- Garrido, I. M. (2015). Opium Trade : The Golden Triangle. Univesidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, 3-4.
- ASEAN Secretariat. (2014, November -). Combating Illegal Drug Trafficking and Drug Abuse Control. Retrieved Februari 7, 2020, from www.ecosecretariat.org
- Aung Thu, Y. (2017, Agustus 10). Myanmar seizes 20m pills in 'Golden Triangle' drug bust. Retrieved November 27, 2020, from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/myanmar-seizes-20m-pills-golden-triangle-drug-bust>
- Ngamkham, W., & Laohing, K.-o. (2019, Oktober 6). Cracking down on meth : International cooperation urged to combat growing production lines. Retrieved November 17, 2020, from Bangkok Post: <https://www.bangkokpost.com/thailand/specialreports/1766004/cracking-down-on-meth>
- Renard, R. (2001). Opium Reduction in Thailand (1970-2000): A Thirty-Year Journey. Bangkok: The United Nations International Drug Control Programme, Regional Centre for East Asia and the Pacific.
- Abubakar, A., & Wahidi, R. (2011). Laporan Singkat Pertemuan ke-8 AIFOCOM Tanggal 25-29 Mei 2011, di Phnom Penh, Kamboja. Phnom Penh: DPR-RI.
- Douglas, J., & Umapornsakula, A. (2018). Myanmar Opium Survey 2018 : Cultivation, Production and Implications. Bangkok: UNODC.